

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prasetyo. 2011. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dilihat dari Rasio Pendapatan Daerah pada APBD 2006-2008*. Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Diyati, Tawang, Ningrum, 2007. "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2005-2007*", Skripsi, FE UMS, Tidak Dipublikasikan.
- Ekawarna, Shita Unjaswati, Sam, Iskandar, dan Rahayu, Sri. 2009. *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Volume 1, No 1, Februari 2009.
- Hadari Nawawi, 1991. *Metode Analisis Data*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, Rais, 2008. *Analisis Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah*. DJPK. Surabaya
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Yogyakarta : AMP YKPN.
- _____. 2009. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Untuk Tahun Anggaran 2009*. Badan Pemeriksa Keuangan. Pemalang.
- Hidayat, Paidi, Pratomio, Wahyu Ario dan Harjito, D. Agus. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran Di Sumatra Utara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 3, Desember 2007.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyana, Budi. 2006. *Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Edisi Pertama, Jakarta : LPKPAP.
- Nataluddin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah di Propinsi Jambi*. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noerdiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Perubahan kedua Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2011 tentang *Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011*.

Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1, No. 1, Juni 2010.

Saiful Huda. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2006-2008*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah Apakah Mengalami Pergeseran*. SNA, 10, 26-28 Juli 2007.

Setyawan, Setu. 2003. *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari Perspektif Akuntabilitas*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 1, Agustus 2003.

Sularmi dan Agus Endro Suwarno. 2006. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Keuangan*. Jurnal Akuntansi Keuangan. Volume 5, No. 1, April 2006.

Susilo, Gideon Tri Budi dan Hariadi, Priyo. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi (Studi Empiris Di Propinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Pertama, 25-26 April 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.*